**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 SERI E NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG
KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan pengaturan hak dan kewajiban dibidang Keuangan Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keuangan Daerah.
- Mengingat** : 1. [Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4022) ;

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209) ;
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
14. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG KEUANGAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang ;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ;
- e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

- f. Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- g. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, yaitu kas, setara kas, dan barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD ;
- i. Kelengkapan Keuangan Daerah adalah hal-hal selain huruf e yang berhubungan dengan keuangan daerah termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan daerah atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- j. Perangkat Keuangan Daerah adalah Unit kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang ;
- k. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah semua badan hukum yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang ;
- l. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Kota Semarang dalam periode tahun anggaran tertentu ;
- m. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah Kota Semarang dalam periode tahun anggaran tertentu ;
- n. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Kota Semarang dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
- o. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah Kota Semarang dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
- p. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah Kota Semarang yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
- q. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Kota Semarang menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga memiliki kewajiban untuk membayar kembali.

Bagian Kedua
Lingkup Keuangan Daerah
Pasal 2

Pemerintah Daerah berhak atas penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai atas penyelenggaraan pelayanan pada publik dan memenuhi segala kewajiban yang berhubungan dengan pihak ketiga serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

BAB II
KEKUASAAN ATAS KEUANGAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

BAB III **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH** Bagian Pertama **Bentuk dan Susunan APBD** **Pasal 6**

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
- (2) Pendapatan Daerah dibagi menurut sumber pendapatan dan pos pendapatan, yang dibagi dalam ayat atau rekening.
- (3) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan pos belanja yang dibagi dalam pasal atau rekening.

Bagian Kedua **Proses Penyusunan Rencana APBD** **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) rencana APBD disusun oleh Walikota beserta Perangkat Daerah.
- (3) Rencana APBD disusun dengan memperhatikan laporan penilaian asset, potensi daerah dan rencana strategis Kota Semarang.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rencana APBD menerapkan prinsip perencanaan dari bawah.
- (2) Prinsip perencanaan dari bawah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja daerah.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD
Pasal 9

- (1) Rencana APBD diajukan oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila Rencana APBD tidak disetujui DPRD, Walikota berkewajiban menyempurnakan Rencana APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan Rencana APBD sebagaimana dimaksud ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila Rencana APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 bulan setelah APBN ditetapkan.
- (2) Jangka waktu penetapan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memperhatikan Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Bagian Keempat
Perubahan APBD
Pasal 11

- (1) Perubahan APBD dilakukan apabila ada:
 - a. Kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis.
 - b. Penyesuaian akibat pelampauan atau tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan.
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya
- (2) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun.

Bagian Kelima
Perhitungan APBD
Pasal 12

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Walikota wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dan dengan menjelaskan alasannya.
- (3) Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban APBD
Pasal 13

Pertanggungjawaban APBD terdiri dari :

- a. Laporan Triwulan;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.